

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Hadisaputro, Hartono, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Harsono Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, Jakarta.
- HS Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim Jhonny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Masjchoen, Sri Soedewi, 1980, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, Eugema Liliawati, 1996, *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi Adrian, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio J., 1997, *Hukum Jaminan, Hak Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeni Remy, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, Cetakan I, Bandung.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis Yuridis*, Yrama Widya, Bandung.
- Usman Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winda, Saraswati, 2006, *Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Sebagai Sarana Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Bisnis Perbankan*, Universitas Erlangga, Surabaya.
- Wicaksono Frans Satriyo, 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa*, Visimedia, Jakarta.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### **3. Wawancara**

Dian Taveri Iswarini, Wawancara, Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.

Diah Renaningtyasari, Wawancara, Notaris-PPAT di Kabupaten Bogor, hari Kamis, tanggal 23 November 2017, pukul 10.00 WIB.

